

## **PANCASILA :**

### **LANDASAN PENATAAN KEKUASAAN NEGARA YANG BERMARTABAT<sup>1</sup>**

**J. Kristiadi<sup>2</sup>**

#### **Pengantar**

Proyeksi kehidupan berbangsa dan bernegara dua puluh lima tahun kedepan, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan, diharapkan menjadi tahun Indonesia emas. Indonesia yang maju, makmur berkeadilan serta berkeadaban berdasarkan Pancasila. Salah satu persyaratan penting dalam mewujudkan Indonesia maju adalah membenahi praktek penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tataran nasional maupun pemerintahan daerah. Penataan kekuasaan pemerintahan secara keseluruhan mendesak dilakukan mengingat implementasi tata kelola pemerintahan selama lebih kurang dua dekade reformasi efektifitas pemerintahan masih belum maksimal karena cukup banyak perangkat regulasi yang tumpang tindih, tidak kohesif dan koheren satu sama, sehingga mengakibatkan tiadanya kesemeluruhan (*comprehensiveness*) karena tidak di tuntun oleh paradigma atau politik hukum yang jelas. Akibatnya selanjutnya, produk regilasi menjadi kusut, kehidupan politik dewasa ini mengalami pendangkalan, manipulatif, transaksional serta semakin jauh dari budaya politik yang

Makalah ini bertujuan memetakan permasalahan mendasar tentang tata kelola kekuasaan serta mencoba mencari terobosan yang dapat mengurai kekusutan politik dengan menemukan titik simpul dimana keruwetan itu mulai diurai. Dengan menemukan titik urai, agenda menyempunakan tatanan

---

<sup>1</sup> Bahan bacaan bagi para peserta Seminar tentang **MENYONGSONG KONTESTASI DEMOKRASI: Mencari Wakil Rakyat yang Bervisi, Bernurasi dan Berparadigma Etis.**

<sup>2</sup> Anggota Dewan Kehormatan RI (DKPP-RI) dan Penliti Denior CSIS, Jakarta.

kekuasaan yang beradab berdasarkan Pancasila dapat dilakukan secara komprehensif.

Untuk memudahkan jalan pikiran, makalah ini disusun sistematis dengan terlebih dahulu, *pertama*, menegaskan Pancasila adalah landasan dan filosofi dasar untuk membangun perilaku politik yang mulia serta probematikanya. *Kedua*, mengelola kekuasaan secara beradab, *Ketiga*, agenda politik mendesak, dan *keempat*, penutup.

### **PANCASILA LANDASAN MEMULIAKAN KEKUASAAN**

Setiap bangsa, terlebih yang sedang mengalami perubahan tatanan kekuasaan yang mendasar, memerlukan sebuah cita-cita besar baik untuk mempertahankan eksistensi dan survivalitasnya maupun untuk mengembangkan diri mencapai cita-cita yang diimpikan bangsa yang bersangkutan. Gagasan luhur tersebut menjadi absolut karena bangsa yang bersangkutan harus menemukan nilai-nilai yang dapat memotivasi, memberi inspirasi serta mempersatukan mereka mewujudkan cita-cita bersama. Upaya tersebut menjadi lebih sulit kalau bangsa tersebut mempunyai tingkat keragaman primordialistik yang tinggi. Heterogenitas yang didasarkan atas sentimen primitif sangat rawan terhadap konflik karena pertarungan menjadi sangat tidak rasional. Glorifikasi dan keunggulan kelompok satu dengan lainnya tidak mempunyai ukuran yang masuk akal, dan oleh sebab itu sulit dikompromikan. Dalam sejarah umat manusia perbedaan primordial yang dijadikan sarana berburu kekuasaan menjadi awal dan penyebab perang saudara yang berdarah-darah dan saling mematikan.

Nasion Indonesia yang terdiri dari berbagai '*bangsa*' sangat beruntung karena mempunyai modal sosial dan modal kesejarahan yang panjang. Berdasarkan modal tersebut, melalui negosiasi yang keras dan melelahkan, namun disertai dengan semangat dan jiwa yang luhur, para pendiri bangsa

berhasil merumuskan pemikiran-pemikiran besar yang sarat dengan nilai-nilai mulia bangsa sebagai dasar, ideologi dan falsafah bangsa. Titik kulminasi dari semangat para pendiri negara untuk membangun bangsa dan negara, akhirnya mereka menemukan jawaban terhadap permasalahan ideologi tersebut: Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila adalah kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Ia merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang digali dari akar budaya bangsa. Keutamaan yang mencakup seluruh kebutuhan hak-hak dasar dan azasi manusia secara universal sehingga dapat dijadikan landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang heterogen.

Dengan demikian Pancasila secara moral dan imperatif menjadi tuntunan tabiat dan perilaku seluruh warga negara dalam mewujudkan cita-cita bersama. Kesepakatan seluruh bangsa tersebut menjadi sangat monumental karena kelompok-kelompok yang mempunyai perbedaan ideologi yang bersandarkan sentimen primordial sepakat lebih mengutamakan kepentingan umum, dan mengesampingkan kepentingan sempit mereka. Oleh karena itu bangsa Indonesia sudah seharusnya mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai tersebut sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita bersama.

Dalam perspektif penataan negara, para pendiri negara mencoba menggali nilai-nilai luhur bangsa yang menjadi alternatif dari pertarungan ideologi besar saat itu, liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu, dan sosialisme yang menekankan kolektifitas. Sebagai bangsa yang baru saja membebaskan diri dari kolonialisme yang merupakan produk dari ideologi kapitalis yang agresif dan ekspansionis, para pendiri negara lebih cenderung untuk memilih opsi penataan kekuasaan berkedaulatan rakyat tetapi lebih mengutamakan kolektifitas. Dalam kalimat Yudi Latif : " Titik tumpu pencapaiannya dipercayakan kepada sosialisme yang bersendikan semangat kekeluargaan dengan menghargai kebebasan kreatif individu. Sosialisme Indonesia menjunjung tinggi azas persamaan dan kebebasan individu, namun

dengan penekanan bahwa individu tersebut adalah individu yang kooperatif dengan sikap altruis, yang mengedepankan tanggung jawab dan solidaritas sosial bagi kebajikan kolektif.”<sup>3</sup>

Dalam tataran ide atau gagasan, Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan cita-cita sudah final dan sangat ideal. Namun sayangnya dalam sejarah perjalanan bangsa, sejak kemerdekaan hingga kini, pelaksanaan Pancasila mengalami berbagai hambatan. Terutama disebabkan oleh dinamika politik yang menyalahgunakan Pancasila untuk menyusun kekuasaan. Ideologi bangsa dan negara yang sarat dengan nilai-nilai luhur, sekedar dijadikan sarana memburu kekuasaan dengan mengingkari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sumber dari segala sumber persoalan terjadinya perilaku politik yang berseberangan dengan Pancasila adalah rentannya para pemegang kekuasaan terhadap godaan kekuasaan. Melalui sejarah perjalanan bangsa, dapat dengan mudah ditelusuri betapa dahsyatnya godaan kekuasaan sehingga mengatur tatanan kekuasaan yang bedadab menjadi sangat rumit. Mulai dari rejim yang disebut Orde Lama, Orde Baru serta Orde Reformasi. Pada awalnya rejim-rejim selalu beretorika bertekad melaksanakan Pancasila. Namun dalam perjalanannya masing-masing rejim tersebut tumbang atau gontai karena memanipulasi Pancasila untuk kepentingan kekuasaan.

Pada kurun waktu yang disebut Orde Lama, Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi meyakinkan kepada rakyat Indonesia untuk membentuk *negara* dan *masjarakat* adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dikutip :

“ Pada hakekatnya dengan kembali kepada hadirat Proklamasi 14 tahun yang lalu lampau, yang melahirkan UUD-1945 waktu kita akan turun ke medan Perjuangan Mahajuda Kemerdekaan Indonesia, kita melawan segala sifat kontra-revolusi dengan wajah revolusioner dalam rangka *negara*, sekali lagi *negara-kesatuan* Republik Indonesia, kita melihat kedepan dengan tekad yang bulat hendak membentuk *masyarakat*, saya ulang *masyarakat* yang adil

---

<sup>3</sup> Latif, Yudi; *NEGARA PARIPURNA: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas*; Pustaka Gramedia, 2011, halaman 583.

dan makmur berdasarkan Pancasila. *Demokrasi Terpimpin* atau *planned democracy* dan ekonomi terpimpin atau *Planwirtschaft* adalah jalan untuk mencapai tujuan Proklamasi di bidang politik dan ekonomi dengan melaksanakan pembangunan semesta berencana. Kembali ke UUD -1945 adalah memberi dasar hidup dan kerdinamik hendak menyelamatkan tugas-tugas luhur yang dipikulkan Proklamasi kepada revolusi jaitu : membentuk *negara* dan *masjarakat* adil dan makmur berdasarkan Pancasila, diatas djalan perdjjuangan dan pembangunan semesta, dengan mengobarkan semangat Revolusi diatas api unggun api potensi-nasional dari pada segala golongan fungsional Rayat Indonesia"<sup>4</sup>.

Namun fakta sejarah membuktikan, Bapak Pendiri Bangsa, Penggali Pancasila serta Pemimpin Besar Revolusi harus "dipaksa" turun dari jabatannya dengan cara yang menyedihkan.

Sementara itu, muncul pimpinan baru produk dari "Revolusi Politik", Jendral TNI Soeharto, yang ingin menata kekuasaan yang dianggap lebih Pancasilais dengan menegaskan dalam Pidato kenegaraan selaku Pejabat Presiden 16 Agustus 1967 :

---

"Pancasila telah disewengkan, dan kehilangan kemurniannya dengan dilahirkannya NASAKOM, yang mengikut dan memasukan komunisme kedaam pelaksanaan Pancasila. Kumunisme jang didasarkan pada dialektika-materialisme, jelas anti Tuhan, sedangkan Pantja-Sila berkeke-Tuhanan jang Maha Esa. Agama diselewengkan untuk kepentingan politik"<sup>5</sup>.

Dengan semangat dan retorika melakukan koreksi terhadap penyelewengan Pancasila, ia menprakarsai dan mendorong agar praktek penyelenggaraan negara disebut Demokrasi Pancasila.

Namun, sekali lagi, bukti histori memberikan pelajaran bahwa retorika "melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekwen", menghasilkan praktek penyelenggaraan negara yang represif. Pemimpin yang gandrung persatuan juga harus "dipaksa" turun oleh kekuatan yang juga mengaku ingin

---

<sup>4</sup> Pokokpokok pikiran Presiden Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin yang di kuitp dalam Pranarka, AMW; Sejarah Pikiran tentang Pancasila; penerbit, CSIS, Jakarta, halaman 163.

<sup>5</sup> Ibid, halaman 209.

meluruskan praktek demokrasi yang dilakukan oleh rejim yang disebut Orde Baru. Kedua pemimpin bangsa yang gandrung melaksanakan Pancasila sebagai untaian cita-cita luhur bangsa, harus menghadapi tragedi jatuh karena godaan kekuasaan yang menggerogoti niat luhur mereka.

Sementara itu, lembaran politik muncul setelah rejim yang disebut otoritarian berakhir karena tuntutan kekuatan reformasi. Babak politik yang merupakan produk dari tertib politik yang disebut Demokrasi Pancasila, yang pada prakteknya adalah pengendalian negara terhadap kekuatan masyarakat, menghendaki agar kebebasan lebih diutamakan dalam mengatur tatanan kekuasaan.

Fenomena yang sangat menonjol dalam era reformasi, dalam melakukan koreksi terhadap tatanan lama, ungkapan dan diskursus publik mengenai Pancasila mencapai titik sangat rendah. Seakan Pancasila menjadi "momok" setelah sekian puluh tahun didengungkan tetapi menghasilkan pemerintahan yang otoritarian dan menindas rakyat. Banyak kalangan menyatakan bahwa para elit di Indonesia era reformasi, terutama elit politik, "malu-malu" menyebut Pancasila. Pancasila seakan sudah dilupakan. Mereka lebih gandrung kepada "ideologi" kebebasan. Oleh sebab itu, penataan kekuasaan pada era reformasi "ideologi" tersebut digunakan untuk menjungkir balikan tatanan kekuasaan lama dengan membangun tertib politik yang lebih memberikan keleluasaan kepada kekuatan masyarakat, *civil society*. "Revolusi demokrasi" yang melahirkan kebebasan juga dimanifestasikan dalam berbagai pemilihan langsung dalam menentukan pejabat publik mulai dari Presiden sampai Kepala Daerah.

Namun dalam perjalanannya, 'Orde Reformasi' juga mengalami proses pengelolaan kekuasaan yang menguatirkan. Dinamika menata kekuasaan yang beradab terjebak dalam kehidupan politik tanpa roh, sarat transaksi dan sesat niat dari para pelakunya. Sementara itu kebebasan sebagai "ideologi" telah mengancam kebebasan itu sendiri. Bahkan atas nama kebebasan orang

dapat berperilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang telah disepakati menjadi falsafah bangsa dan negara seakan-akan hanya menjadi monumen mati akibat dari praktek-praktek politik dan perilaku para pemimpin yang munafik. Kebebasan juga dipraktekkan secara eksektif oleh sementara media yang tidak melayani kepentingan publik, melainkan mengabdikan kepada kepentingan modal serta politik jangka pendek.

Gejala yang menguatkannya tersebut, penyebab utama adalah niat sesat dari mereka yang masuk gelanggang politik adalah hasrat dan nafsu ingin memperoleh kedudukan atau kekuasaan. Jauh dari sikap mulia untuk memperjuangkan suatu cita-cita yang berkaitan dengan peningkatan harkat dan martabat rakyat. Kerusakan tatanan politik sudah dimulai sejak mereka yang berniat menjadi pejabat publik hanya menginginkan kedudukan politik. Mereka mengawali dengan niat sesat ( mungkin lebih tepat *niat kejahatan hasrat*), semata-mata mereka hanya berangan-angan untuk berkuasa, memburu kekayaan serta membangun dinasti politik; bukan iktikad luhur mengabdikan diri kepada masyarakat. Terjun ke dunia politik bukan karena panggilan hidup sehingga berani me-wakaf-kan diri untuk bangsa, melainkan menjadi pemburu kekuasaan dan kenikmatan. Pendangkalan politik semakin lama semakin menggerus modal sosial bangsa. Saling percaya ada kecenderungan semakin menipis. Tingkat kepercayaan politik terhadap seluruh lembaga politik dan lembaga negara mencapai tingkat sangat rendah. Demikian pula intoleransi di antara warga masyarakat juga meningkat. Gejala pembusukan tidak hanya terjadi pada tataran negara tetapi juga merangsek ke ranah publik.

Sesat niat juga sangat menyuburkan korupsi politik dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merajalela. Produk legislasi ditengarai menjadi arena perdagangan kepentingan politik yang pragmatik dan oportunistik. Akibatnya negara tidak mempunyai kebijakan perundang-undangan sebagai infrastruktur kebijakan politik guna mewujudkan

masyarakat yang dicita-citakan. Proses penyusunan regulasi dari pembuatan undang-undang sampai dengan peraturan daerah, ditengarai sarat dengan transaksi politik kepentingan golongan. Oleh karena perundang-undangan tidak memberikan arah kebijakan melainkan jalan yang menyesatkan bagi siapa pun yang melaluinya. Negara praktis macet dan terkunci dengan berbagai kepentingan yang saling menyandera karena struktur kekuasaan yang dirajut dengan nafsu keserakahan. Manajemen pemerintahan semakin parah karena politik citra menjadi pola pengelolaan kekuasaan yang mengutamakan *'wajah'* dari pada efektifitas pemerintahan. Akibatnya banyak kebijakan-kebijakan yang tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya. Padahal, terlebih dalam masa transisi politik, rakyat memerlukan bukti konkrit bahwa demokrasi adalah sistem yang lebih baik dalam memperhatikan nasib rakyat dibandingkan dengan sistem-sistem yang lain.

Sementara itu korupsi telah membuat rute yang menakutkan karena fenomena hiperealitas telah menyeruak kedalam tubuh negara dan bangsa. Sesuai dengan karakternya, hiperealitas menciptakan kepalsuan berbaur dengan orisinalitas, masa lalu berbaur masa kini; fakta bersilang sengkabut dengan rekayasa; symbol, gambar, kata-kata melebur dengan kenyataan; dusta bersenyawa dengan kebenaran. Prinsip-prinsip kebenaran, kepalsuan, keaslian, isu, realitas mambaur menjadi satu sehingga sebagian masyarakat menjadi bingung mana yang benar mana yang laknat.

Para politisi, karena kiblatnya adalah kepentingan kekuasaan serta janji-janji kosong, telah mengakibatkan rakyat kehilangan orientasi. Cakrawala hidup telah sedemikian kabur sehingga politik yang seharusnya mulia, tetapi prakteknya seringkali menjadi tindakan yang terkutuk. Akibatnya, kebebasan dan demokrasi yang merupakan tanda dan sarana menuju bangsa yang sejahtera serta memberikan sinar terang yang menuntun bangsa Indonesia ke peradaban yang lebih tinggi, dalam waktu

yang hampir bersamaan muncul 'tanda-tanda zaman' menuju 'abad' kegelapan. Terjadi gerhana peradaban. Sinar yang memancar dari nilai-nilai luhur bangsa terhalang oleh politik transaksional, terutama '*money politics*', yang melekat dalam proses politik, baik rekrutmen maupun dalam menyusun regulasi di tingkat pusat dan daerah. Benih-benih demokrasi yang tumbuh dalam wujud demokrasi prosedural telah semakin menjauhkan kehidupan politik yang beradab dan bermartabat.

Konsewensinya, tingkat kepercayaan publik terhadap demokrasi semakin menurun. Hal ini diperparah dengan merajelalanya tingkat korupsi politik yang melibatkan kader lintas partai. Peranan uang sangat deterministik dalam proses dan kompetisi politik. Akibat buruk selanjutnya adalah semakin menurunnya tingkat persepsi masyarakat terhadap kemampuan dan kapasitas publik dalam mempengaruhi kebijakan negara.

### **MENGELOLA KEKUASAAN SECARA BERADAB**

Pengalaman dari berbagai kegagalan pengelolaan kekuasaan yang dilandasi nilai-nilai luhur selama ini, termasuk praktek politik sekitar dua puluh tahun terakhir, mungkin disebabkan oleh karena melupakan salah satu wanti-wanti yang dikemukakan oleh salah seorang perumus Konstitusi, Soepomo, yang mengingatkan untuk mengutamakan kualitas manusia sebagaimana ditegaskan oleh Soepomo :

" Paduka Tuan Ketua, yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup bernegara, ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun kita membikin undang-undang menurut kata-kata bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, undang-undang dasar tadi tidak ada artinya dalam praktek"<sup>6</sup>.

Mungkin peringatan Soepomo itu pulalah yang mendapatkan penegasan dalam kajian Yudi Latif dalam kesimulannya yang menyatakan :

---

<sup>6</sup> Soepomo, dalam Latif, Yudi; halaman 610.

" Negara kesejahteraan itu sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara-disertai dengan dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga"<sup>7</sup>.

Kuotasi tersebut sebenarnya secara tersirat ingin menyatakan bahwa dalam melaksanakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang terpenting adalah manusianya. Boleh saja nilai-nilai luhur dirumuskan dalam kalimat yang sangat memuliakan kemanusiaan, tetapi selalu kembali kepada kualitas manusianya. Sementara itu , secara kodrati manusia selalu mempunyai dua aspek, dorongan untuk berbuat, bahkan bernafsu, melakukan perilaku baik, amanah dan mulia, tetapi pada saat yang bersamaan manusia juga mempunyai nafsu keserakahan, ketamaan, ke-angkaramurkaan, dan lain sebagainya. Di wilayah politik, pertarungan nafsu tersebut menjadi cenderung berat sebelah. Bobot nafsu keserakahan cenderung lebih besar dibandingkan nafsu amanahnya. Alasan mendasarnya, daya goda kekuasaan sangat kuat, sementara itu ranah politik bukan instrumen atau lembaga untuk menjadikan orang menjadi baik. Politik adalah medan persaingan, bahkan pertarungan kepentingan dan ranah yang absah untuk melakukan siasat mensiasati demi kepentingan yang hendak diraih.

Permenungan yang sangat mendalam terhadap eksistensi manusia dilakukan oleh Prof Dr Driyarkara. Ia menjelaskan manusia secara kodrati mengandung dua unsur: rohani dan jasmani. Yang pertama adalah unsur kesempurnaan hidup, sementara itu yang kedua mempunyai kecenderungan untuk menikmati dan mengikuti kuasa daging. Secara sederhana jawaban Driyarkara terhadap memudarnya Pancasila, dapat dirumuskan secara singkat sebagai berikut : dalam perspektif politik, Indonesia sebagai entitas politik, sudah merdeka; tetapi manusia, terutama para pemimpinnya yang mengisi ruang politik, masih belum berdaulat sepenuhnya sebagai kodrat

---

<sup>7</sup> Ibid, halalaman 607.

manusia. Manusia Indonesia masih harus berjuang untuk "*bertachta atau berdaulat terhadap dirinya sendiri*" dengan berusaha terus menerus membebaskan diri dari godaan kenikmatan daging yang melekat pada diri manusia<sup>8</sup>.

Selain menegaskan kualitas manusia sebagai unsur terpenting dalam penyelenggaraan negara, para pendiri negara juga menegaskan bahwa pengelolaan kekuasaan yang demokratis bukan menjiplak demokrasi yang dipraktekkan di negara-negara Barat yang bersifat individualistis<sup>9</sup>, tetapi demokrasi yang memperjuangkan keadilan social serta tidak hanya memperjuangkan hak-hak sipil dan politik. Bung Karno menyebut Sosio-Demokrasi. Di kutip :

"Demokrasi –masyarakat , sosio-demokrasi, adalah timbul karena sosio-nasionalisme. Sosio-demokrasi adalah pula demokrasi yang berdiri di dua kakinya di dalam masyarakat. Sosio-demokrasi tidak ingin mengabdikan kepentingan sesuatu gundukan kecil sahaja, tetapi kepentingan masyarakat. Sosio-demokrasi bukanlah demokrasi ala Revolusi Perancis, bukan demokrasi ala Amerika, ala Inggris, ala Netherland, ala Djerman dll; tetapi ia adalah demokrasi sejati yang mencari keberesan politik DAN ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik DAN demokrasi-ekonomi."<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sudiarja, A, SJ ( eds): KARYA LENGKAP DRIYARKARA : *Esai-Esai Filsafat Pemikir Yang terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun 2006.

<sup>9</sup> Perdebatan di Amerika dewasa ini mulai diramaikan dengan isu kekecewaan masyarakat terhadap praktek demokrasi di negara tersebut setelah dilakukan sekitar 200 tahun, ternyata tidak dapat mengatasi dua permasalahan akut , yaitu *inequality* (ketimpangan ekonomi) serta *insecurity* ( rasa tidak aman dari berbagai ancaman, antara lain, globalisasi, perubahan iklim, dll). Oleh sebab itu pemikiran dewasa ini berkembang pemikiran untuk mempraktekan Socio-democracy yang di oraktekkan di negara-negara Nordic. Lihat antara lain Muller, Jerry; ***Foreign affairs: Capitalism and Equality***; March/April, 2013

<sup>10</sup> Latif, Yudi; hal 411

Gagasan tersebut sejalan dengan pemikiran Bung Hatta meyakini bahwa demokrasi di Indonesia harus berorientasi kepada keadilan social, kepentingan umum, musyawarah-mufakat serta mempunyai semangat kolektivisme. Di Kutip:

"Tanda-tanda kolektivisme itu nampak pertama kali pada sifat "tolong menolong". Dalam segala usahanya dan caranya ia mempergunakan tenaganya orang desa masih menyangka dirinya sebagai satu anggota dari kaum...Lebih jelas kelihatan tanda-tanda kolektivismne itu pada hak " milik atas tanah" . Pergaulan Hidup di desa pada mulanya tidak mengenal hak orang seorang atas tanah, tanah itu milik bersama."<sup>11</sup>

### **Persaingan untuk kemakmuran**

Persaingan adalah fenomena sosial yang merupakan produk manusia untuk mempertahankan survivalitasnya. Kompetisi merupakan bagian dari kehidupan manusia. Konon, kompetisi antar manusia sudah eksis sebelum manusia lahir di dunia, atau sejak dari proses pembuahan. Rivalitas tersebut mungkin dapat ditelusuri dari geneologi atau proses kehadiran manusia itu sendiri. Jutaan sperma harus besaing ketat untuk menghasilkan satu pemenang memperebutkan sel telur yang akan menjadi embrio manusia. Oleh sebab itu rivalitas adalah keniscayaan dalam kehidupan bersama yang tidak dapat dihindari. Tetapi kontestasi dapat diatur agar tidak saling mengancurkan tetapi saling memuliakan, setidaknya menghasilkan sesuatu yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persaingan umat manusia yang paling mendasar adalah naluri untuk cenderung mendapat pengakuan ( rekoqnisi), dicintai, mempunyai rasa bangga dan kehormatan, rasa nikmat, hidup bahagia, dan lain sebagainya. Intinya, memenuhi hasrat kepentingan pribadi (*self-interests*) yang melekat pada manusia. Pemahaman ini bila dikaitkan dengan kutipan Soepomo diatas

---

<sup>11</sup> Ibid, hal 416.

semakin relevan untuk menata kekuasaan sebagaimana yang dilakukan oleh manusia sebagaimana adanya, bukan manusia sebagaimana seharusnya. Artinya, negara yang disusun oleh manusia yang mempunyai kodrat paradox, kecenderungan berbuat mulia dan kecenderungan yang sebaliknya.

Menekankan peran sentral manusia untuk menata kekuasaan yang beradab, juga perlu memperhatikan petuah yang merupakan dalil klasik tetapi populer dari Lord Acton : '*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*'<sup>12</sup> Rangkaian kata yang mengungkapkan makna sangat mendalam. Kekuasaan mempunyai dua tabiat yang kontradiksi secara diametral satu sama lain: daya pesona yang luar biasa, tetapi sekaligus juga mempunyai kecenderungan merusak. Apalagi kalau kekuasaan itu absolut, pemegang kekuasaan pasti akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Daya pikat kekuasaan semacam itu mengakibatkan pertarungan memperebutkan kekuasaan menjadi sangat rawan terhadap tindakan yang menghalalkan cara.

Dalam terminologi Rudolf Otto, menggentarkan sekaligus memikat dan mempesona. Politik praktis tidak mengenal kawan atau lawan, sehingga begitu banyak orang melakukan simplifikasi dengan menganggap bahwa dalam dunia politik praktis satu-satunya yang abadi adalah kepentingan, yang diidentikkan dengan kekuasaan. Kompetensi etik dan moral dibalik perjuangan kekuasaan adalah agar politikus mampu melayani masyarakat warga sehingga kemungkinan untuk mencapai '*bonum commune*' itu diperbesar dan diperluas.

Dalam perspektif yang berbeda, tetapi masih berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan, Albert Hirschman dengan panjang lebar mencoba

---

12. Konon, ungkapan berasal tersebut dari surat Lord Acton kepada Bishop Mandell Creighton, 1887: "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men". Acton was preceded by William Pitt, the elder, who voiced a similar thought in a House of Lords speech in 1770: "Unlimited power is apt to corrupt the minds of those who possess it; and this I know, my lords, that where laws end, tyranny begins"; demikian pula beberapa pemikir seperti **Henry Adam, Jacob Burckhardt, Francois Guizot, Alexis de Tocqueville, Thomas Carlyle, Henry Maine and Herbert Spencer**, mengungkapkan hal yang senada : " **The will to power is insensibly transformed into a will to evil.**"Ungkapan itu juga dapat dicermati dalam Gertrude Himmelfarb; *Lord Acton : A study in Conscience and Politics*; The University Of Chicago Press, 1952.

meyakinkan bahwa nafsu manusia, termasuk nafsu kekuasaan (yang merusak) hanya dapat ditundukkan oleh nafsu lain yang lebih rendah daya rusaknya, yaitu kepentingan pribadi (*self interest*) terutama interes ekonomi (kemakmuran)<sup>13</sup>. Untuk lebih menegaskan pendapatnya ia juga mengutip James Stuart mengatakan bahwa ekonomi modern adalah kendali ampuh yang pernah ditemukan untuk melawan kekuasaan yang despotik, '*A modern economy, therefore, is the most effectual bridle against the folly of despotism*<sup>14</sup>'.

Dalam ungkapan yang lain mungkin dapat dikatakan sumber kejahatan korupsi adalah instink dan nafsu serakah untuk mencapai kenikmatan pribadi. Kehendak itu melekat dalam setiap manusia. Karena itu, jika doktrin, kaidah, dan akal sehat tidak mempan menaklukkan perilaku korup. Kejahatan tersebut harus dihadapkan dengan hasrat amanah yang juga intrinsik dalam setiap manusia. Oleh karena itu, perjuangan memberantas korupsi adalah perjuangan secara terus-menerus bagaimana hasrat amanah dapat dikelola sehingga dapat menjinakkan hawa nafsu koruptif.

Keseluruhan penjelasan Albert Hirschman mungkin dapat mudah difahami dalam pengantar bukunya yang memberikan ilustrasi bahwa sekelompok orang yang mempunyai nafsu membunuh dengan alasan yang sama sekali tidak rasional, perbedaan warna kulit, misalnya, dapat batal melakukan perbuatan itu karena orang yang akan dibunuh menyebarkan uang. Para pembunuh membiarkan korban terus lari dan mereka lebih tertarik mengumpulkan uang yang berceceran dari pada membunuh. Ia menyimpulkan, dalam perspektif individual mungkin peristiwa itu hanya dianggap korban beruntung, batal dibunuh, karena para jagal mempunyai kepentingan/interes yang relatif lebih bijak. Tetapi dalam perspektif universal

---

<sup>14</sup> Ibid, Halaman 83

ia mencoba meyakinkan bahwa nafsu kekerasan (*violent passion*) dapat ditundukkan oleh kepentingan yang kurang ganas (*innocuous interest*)<sup>15</sup>.

Watak kekuasaan semacam itu mengakibatkan pertarungan memperebutkan kekuasaan menjadi sangat rawan terhadap tindakan yang menghalalkan cara, mulai dari bujuk rayu, intimidasi sampai dengan tekanan fisik. Sedemikian kejamnya pertarungan kekuasaan sehingga ikatan-ikatan pertemanan, keakraban, persaudaraan, bahkan ikatan yang didasarkan atas sentimen primordial: suku, agama, ras dan keturunan tidak dapat dijadikan sarana meredakan pertarungan politik. Bahkan sebaliknya, penyalahgunaan ikatan primordial sebagai sarana perburuan kekuasaan dapat mengakibatkan perang saudara yang sangat kejam dan berlarut-larut<sup>16</sup>.

Dalam perspektif politik, upaya umat manusia mengelola nafsu kekuasaan agar para pemegang kekuasaan tidak sewenang-wenang adalah tatanan politik yang dapat memaksa penguasa tunduk dan dikontrol oleh warga masyarakat. Ia adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia yang menyuburkan nilai-nilai kehidupan yang lebih menghargai hak-hak individu, kesetaraan serta pengakuan terhadap hak-hak azasi manusia. Pada dasarnya perkembangan peradaban manusialah yang telah memungkinkan umat manusia dapat memperadabkan kekuasaan yang mempunyai daya pesona yang luar biasa, tetapi sekaligus juga watak yang cenderung merusak tatanan kehidupan manusia. Pesona kekuasaan yang menakjubkan itulah yang membuat para pemburu kekuasaan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Memang dalam tatanan demokrasi daya rusak kekuasaan tidak dapat ditaklukkan secara absolut, karena hal itu juga berkaitan erat dengan salah satu sifat manusia yang serakah dan lemah

---

<sup>15</sup>Ibid, halaman x

<sup>16</sup> Buku yang membahas itu antara lain: Snyder, Jack, Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah, terjemahan dari buku From Voting to Violence, penterjemah Martin Aleida & Parakitri Simbolon, Penerbit Gramedia, November 2003.

menghadapi godaan kenikmatan. Namun karena sifat luhur manusia jugalah kekuasaan dapat digunakan untuk kemaslahatan umat manusia, terutama untuk mengelola kehidupan bersama menuju kesejahteraan lahir dan batin. Martabat dalam tertib politik yang demokrasi juga dibahas secara panjang lebar oleh Montesquieu<sup>17</sup>. Dia membedakan tiga jenis pengelola kekuasaan negara: Republik, Monarki dan Depostik atau disebut juga Demokrasi, Oligarki dan Monarki. Dari ketiga jenis tersebut, demokrasi adalah tatanan kekuasaan yang mempunyai 'virtue' yang menghargai martabat warganya.

Secara kelembagaan agar perilaku kekuasaan tidak menjadi liar, ia harus 'dikerangkeng' dalam suatu struktur bangunan kekuasaan sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan kekuatan di dalam komponen-komponen struktur tersebut, agar mereka satu dengan lainnya dapat saling mengontrol. Dalam bahasa yang lebih teknis disebut '*checks and balances mechanism*'. Praktek penyelenggaraan tertib politik yang demokratis dengan membangun saling kontrol antara lembaga-lembaga politik tidak terlepas dari pemikiran Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ungkapannya yang sangat terkenal bahwa kekuasaan hanya dapat dilawan dengan kekuasaan<sup>18</sup>.

Oleh karena itu, mewujudkan demokrasi bukan hanya sekedar membangun sistem, mekanisme, prosedur politik, tetapi juga harus membangun lembaga-lembaga yang dapat menjamin mekanisme saling kontrol tersebut dapat berfungsi, seperti partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum, lembaga perwakilan, birokrasi dan lain sebagainya. Namun upaya lain yang tidak kalah pentingnya adalah menanamkan tata nilai yang dapat menghadirkan roh yang menghidupkan dan sekaligus menguatkan demokrasi. Tiadanya sukma dalam tatanan demokrasi hanya akan

---

<sup>17</sup> Montesquieu, *The Spirit of Laws*, terutama buku ke-2: *On Laws Deriving Directly from the Nature of the Government*, hal. 10: dan buku ke-3: *On the Principles of the Three Governments*, diterjemahkan dan diedit oleh: Anne M. Cohler, Basia; Miller, Harold Stone, Cambridge University Press, New York, 1989, hal. 113.

<sup>18</sup> Opcit, Hirschman, Albert O, hal. 78: Ungkapan tersebut lengkapnya berbunyi: 'So that may be no abuse of power, it is necessary that, through the disposition of things (par la disposition de chose), power be stopped by power'.

menjadikan sistem tersebut rapuh sehingga mudah ambruk atau menjadi anarkis.

Dewasa ini praktek demokrasi perwakilan juga mendapatkan tantangan akibat dari adonan gelombang mashab populisme, pasca kebenaran, eskalasi kemajuan teknologi digital dan politik identitas.

Populisme sebagai fenomena yang mempunyai bermacam makna, tetapi mempunyai keserupaan berupa kecurigaan dan rasa permusuhan terhadap elit, arus utama pencatatan politik serta lembaga-lembaga yang mapan. Para penganutnya selalu mempunyai persepsi diri patriotic dan paling peka terhadap mereka yang "terlupakan". Gejala ini nampaknya semakin mendapatkan momentum dan merebak sejak Donald Trump maju dalam Pemilihan Presiden Amerika tahun 2016. Sejak kampanye ia mengobarkan intoleransi juga membangun Partai Republik sebagai institusi milik pribadi. (The Economist, April 21st-17 H 2018). Fenomena regresi demokrasi juga terjadi di banyak negeri, misalnya Amerika Latin, antara lain, pemusatan kekuasaan eksekutif, politisasi lembaga peradilan, menyerang habis-habisan independensi media, pejabat public memanipulasi kekuasaan untuk kepentingan pribadi. (Is democracy Dying; Foreign Affairs, May/June 2018).

Dalam perspektif eskalasi digital, demokrasi modern yang telah diprakrekan selama ratusan tahun dianggap semakin usang. Penyebab utamanya, menurut Yuwal Noah Harare dalam buku Kisah Ringkas Masa Depan Manusia (Homo Deus: A Brief History Of Tomorrow, 2017), adalah tingkat akselerasi kecanggihan teknologi yang menghasilkan kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*) tidak dapat diikuti oleh kemampuan manusia membentuk institusi politik sejalan dengan tingkat percepatan tersebut. Ia yakin :.... "demokrasi akan pudar bahkan lenyap.. lembaga-lembaga politik seperti pemilihan umum, partai politik dan parlemen menjadi kedaluwarsa.. bukan karena lembaga-lembaga tersebut tidak etis, melainkan karena tidak mampu memproses data lebih efisien...."

"in the twenty first century, democracy might decline and even disappear ...institutions like elections, political parties and parliaments might become obsolete, not because they are unethical, but because they can't, process data efficiency enough"....( p. 436-436). " Beberapa puluh tahun ke depan di prediksi, bukan ramalan yang harus terwujud,; kesahihan teknologi telah mampu menyusun data biokimia dalam alogaritma, sehingga organisme manusia sekedar alogartima. Manusia semakin mampu merekayasa organisme manusia.

Ia juga wanti-wanti kekuasaan despotic ini dikonstruksi melalui skema alogatihma berbasiskan maha data (Big Data) yang sangat melimpah dan tingkat keragaman yang tinggi. Teknologi baru mampu melakukan proses pengolahan, penyimpanan dan analisis beragam data berjumlah sangat besar volume serta tingkat akselerasi amat cepat, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh dan lengkap tentang aspirasi, kehendak, sentiten serta hasrat manusia . Namun ia juga menguatirkan, meskipun teknologi digital akan sangat berguna untuk mensejahterakan masyarkat. Namun di tangan seorang yang sangat ambius akan menyebabkan bencana yang memamatkan. Penguasa politik tiranikal dapat melakukan ekspansi ke negara lain dengan menciptakan robot-robot melalui program alogartihma, berbasiskan maha data ( Big Data) yang besarannya melimpah ruah serta amat beragam. Rejim ini juga dapat mengontrol ketat warga negara yang yang secara emosional tidak senang kepada pemimpinnya. Bermodalkan gelang biometric, (*Biometric bracelet*) penguasa dapat mengetahui warga yang muak melihat fotonya. (Yuval Noah Harari, 21 Lessons for the 21st Century, 2018, disebut Digital Dicatorship ( Kediktatoran Digital p 61).

Merebaknya fenomena populisme, pasca kebenaran dan politik identitas juga mengakibatkan Kebebasan dan kesetaraan serta merebaknya masyarakat sipil ternyata tidak selalu berkorelasi dengan kualitas demokrasi. Masyarakat madani yang bertebaran di se antero negeri nampaknya

bergerak tidak focus kepada visi, bahkan sebagian mempunyai ideology anti demokrasi. Oleh sebab itu dikuatirkan pesta demokrasi diancam anarki oleh masyarakat anti madani (Sisi Gelap Demokrasi; Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia, Husni Mubarak & Irsyad Rafsadi (ed), Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Yayasan Paramadina Jakarta, 2015). Oleh sebab itu acara ramai-ramai jalan kaki menjadi ajang persekusi dan intimidasi ( Kompas.com, 30 April 2018). Nilai-nilai mulia religi di pelintir menjadi ujaran saling membenci sesama anak bangsa yang hahekatnya adalah saudara sendiri.

Sejak awal kemerdekaan para pendiri bangsa sangat menyadari bangsa Indonesia bertaburan bahasa, budaya, ras, suku, kepercayaan, agama dan kelompok-kelompok yang berbeda. Masing-masing komponen bangsa mempunyai konsep, gagasan, pemahaman yang bebeda tentang rasa keadilan dan kebahagiaan. Maka para Bapak Bangsa memilih opsi negara kesepakatan yang didasarkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (demokrasi). Kepiwaian seni politik dan kerja amat keras para pendiri negara berhasil mengelola serpihan perbedaan menjadi mozaik (kolase) yang indah dan menawan. Sebutan populernya masyarakat Bhineka Tuggal Ika.

Tugas mulia tersebut amat rumit, bahkan dapat dikatakan para pendiri bangsa berhasil mengakali kemustahilan. Karena keragaman bangsa Indonesia meliputi, tradisi, religi, budaya, doktrin, gagasan partikular yang masing-masing mempunyai konsep eksklusif menafsirkan keadilan dan kebahagiaan. Perangkat gagasan tersebut, dalam bahasa Thomas Kuhn (1960), memuculkan fenomena yang disebut ketidaksandingan atau inkonsumensurabel (incommensurability). Dalil-dalil bernuansa primordial hampir mustahil dipadukan atau di sandingkan karena perbedaan yang dianggap hakiki, komprehensif, utuh, sempurna serta absolut sehingga dianggap mampu menyelesaikan masalah di dunia yang fana dan di alam baka. Perbedaan amat mendasar, ibaratnya siang dan malam. Pada hal,

kaidah demokrasi, setiap warga negara mempunyai hak berbeda, tetapi juga juga mempunyai kewajiban berintegrasi.

Demokrasi hanya akan menjadi tertib politik yang nyaman apabila para warga dapat saling saling rasa merasakan, saling percaya (*mutual trust*), mempunyai cita rasa terhadap komitmen kesepakatan satu dengan yang lain (*mutual commitment*), serta saling mengerti (*mutual understanding*). Nilai-nilai tersebut harus selalu di perbarui secara kreatif sehingga menemukan format yang handal bagi identitas bangsa sebagai entitas politik. Identitas bangsa hanya dapat permanen bila dibangun, di mufakati, serta di desain bersama oleh semua komponen bangsa yang mempunyai niat baik demi kehidupan bersama.

Tanpa berpegang teguh terhadap nilai-nilai mulia, pemilu sebagai manifestasi demokrasi tidak pernah bebas dari kebohongan dan kecurangan. Terlebih bila kompetisi politik menjadi pertarungan menang-kalah disertai politik identitas, kebohongan berkorelasi positif dengan loyalitas kelompok. Oleh sebab itu penataan regulasi tentang Pemilu harus bermodalkan niat politik mulia yang kuat para politisi untuk melepaskan interes politik sesaat dan golongan.

Studi Sophia Rosenfield ( *Democracy And in The Age of Lies* dalam *Democracy and Truth*, 2019). Ia mendiagnosis demokrasi Amerika dalam prespektif historis dan membahas relasi antara demokrasi dan kebohongan. Temuannya, demokrasi moderen di bentuk melalui interaksi antara praktek demokrasi dan kebohongan selama dua ratus tahun. Pakemnya, kebenaran dalam demokrasi adalah lawan dari kebohongan dan kekeliruan terhadap dogma yang sesat serta informasi yang salah Namun demokrasi adalah medan pertarungan kepentingan subyektif, sehingga kebohongan serta kecurangan digunakan sebagai legitimasi politik. Kebenaran tidak diperhitungkan sebagai nilai-nilai mulia, justru dusta dapat menjastifikasi konsensus politik.(Hannah Arendt, *Lying In Politics* 1971).

Akibatnya, kebenaran sangat rentan dalam praktek demokrasi. Persoalan menjadi lebih rumit karena bekelindannya kebenaran abadi (dogma), kebenaran logika dan kebenaran empirik. Kebohongan menjadi ancaman yang membunuh demokrasi bila rakyat dihasut dan di cekoki kebohongan melalui retorika dan demagogi politik. Dikutip : .." hence the particular dangers associated with demagogous' frequent false claim of illegitimacy or cheating when the vote count goes against them". ( p 165)...

Oleh karena itu tidak mustahil bahwa negara-negara seperti Yunani dan Roma yang pernah berabad-abad menerapkan sistem ini, mengalami arus balik menjadi kekaisaran. Pengalaman tersebut harus lebih menyadarkan siapa pun yang ingin mewujudkan kehidupan demokrasi adalah perjuangan membangun peradaban untuk menyelamatkan manusia dari kesewenang-wenangan rejim yang lalim, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Demokrasi bukan hanya bangunan struktur kekuasaan yang masing-masing lembaga-lembaga politik saling kontrol satu dengan lainnya. Demokrasi adalah pandangan hidup (tata nilai) yang menjadi pedoman sikap dan perilaku warganya, karena itu ia harus menjadi referensi bagi perilaku politik warga masyarakat. Oleh sebab itu dalam masyarakat demokratis, pendidikan politik merupakan faktor yang sangat penting mendukung terwujudnya masyarakat yang demokratis, yaitu proses internalisasi nilai-nilai demokrasi universal yang mengutamakan kesetaraan (termasuk gender), pluralisme, toleransi, hak azasi manusia, perlindungan minoritas, penegakan hukum, kepemihakan terhadap mereka yang lemah, serta membangun sikap siap untuk menang tetapi juga bersedia kalah dengan ikhlas.

## **Penutup**

Praktek politik selama lebih kurang 20 tahun telah berhasil melembagakan sebagian dari penyelenggaraan politik demokratis, khususnya kompetisi dalam memperebutkan jabatan-jabatan publik telah menjadi bagian

dari kehidupan politik yang wajar. Prestasi yang patut dibanggakan karena pelembagaan dalam kompetisi politik dapat menjadi modal yang sangat berharga untuk melakukan konsolidasi kehidupan demokrasi yang lebih substansial. Namun sayangnya, dalam waktu yang hampir bersamaan muncul tanda-tanda menakutkan karena elit politik telah memanipulasi demokrasi prosedural sebagai legitimasi perilaku politik yang korup. Elit politik mendapat mandat rakyat tetapi justru menginjak-injak harkat dan martabat rakyat. Rakyat digagahi oleh mereka yang seharusnya melindungi, mengayomi serta membuat rakyat sejahtera. Reformasi politik masih belum berhasil membentuk sikap dan perilaku elit politik yang mempunyai komitmen mengutamakan kepentingan umum. Pesona dan nikmat kekuasaan telah membuat perilaku politik elit semakin jauh dari standar peradaban bangsa. Praktek penyelenggaraan pemerintahan semacam itu jelas lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya bagi masyarakat. Kemudaratn telah dimulai dari niat para politisi yakni upaya habis-habisan untuk menjadi bagian dari penguasa yang bergelimang kemewahan. Sesat pikir dan niat sudah dimulai sejak mereka membayangkan nikmatnya kekuasaan yang akan direguk. Keserakahan para penguasa telah menghilangkan roh peradaban yang memuliakan politik: Pancasila.

Oleh sebab itu pendidikan ideologi Pancasila harus dilakukan kepada para kader-kader partai politik yang nanti akan menjadi pemegang otoritas politik. Mereka inilah harus menjadi sasaran prioritas, sebab merekalah yang akan memiliki kewenangan yang setiap keputusannya mengikat warga masyarakat. Transformasi politik tanpa disertai dengan pembangunan karakter yang didasarkan nilai-nilai luhur bangsa dapat dipastikan hanya akan merusak tatanan dan menghancurkan masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu pembangunan karakter harus pula menjadi salah agenda urgensi. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan kehidupan politik menjadi lebih mulia. Kehidupan politik lebih

bermartabat. Ke depan diharapkan, mereka yang akan terjun ke medan politik harus berbekal niat untuk berjuang bagi kepentingan bangsanya; bukan mencari gelimang kemewahan dan kekuasaan. Cara paling praktis, murah tetapi efektif adalah kesediaan para tokoh dan pimpinan di berbagai bidang dan lapisan masyarakat memberikan keteladanan dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Mengatakan sesuatu, terutama janji-janji politik tanpa disertai dengan bukti yang konkrit, hanya akan menyuburkan perilaku munafik dan membuat rakyat semakin tidak percaya kepada tatanan baru yang disebut demokrasi.

Sementara itu untuk memutus mata rantai kesemrawutan yang dihadapi bangsa Indonesia agenda yang harus menjadi prioritas adalah menyusun regulasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Perangkat regulasi harus mempunyai tujuan dan arah yang jelas serta dilakukan secara komprehensif, kohesif, dan koheren antara regulasi yang satu dengan lainnya. Beberapa regulasi yang terkait dengan penataan kekuasaan pemerintahan, misalnya regulasi tentang pemilihan presiden, kepala daerah, dewan perwakilan rakyat, sistem kepartaian, pemilihan umum, desentralisasi, perimbangan keuangan pusat dan daerah, bahkan regulasi yang berkenaan dengan keamanan nasional. Dengan kebijakan politik perundang-undangan yang mempunyai proyeksi yang visioner serta pakem dan paradigma yang jelas, diharapkan dapat diwujudkan pemerintahan yang efektif tetapi tetap dapat dikontrol oleh masyarakat.

Gagasan dan pemikiran semacam itu sudah banyak dimiliki oleh masyarakat, bahkan sudah terlalu sering disampaikan kepada para wakil rakyat serta pemerintah dalam berbagai forum dan kesempatan. Namun nampaknya mereka sudah kedap terhadap himbuan serta wacana publik yang menyuarakan dan mendesak agar agenda reformasi dilakukan dengan

kaidah-kaidah yang benar. Oleh sebab itu sudah saatnya masyarakat membangun kekuatan yang demokratis untuk melakukan tekanan dan desakan terus-menerus kepada otoritas politik agar tunduk kepada kehendak rakyat.

## **AGENDA MENDESAK**

### **1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif.**

Beberapa prinsip mendasar dan paradigma yang harus dijadikan acuan dalam menyusun penyempurnaan regulasi politik adalah sebagai berikut. *Pertama*, proses demokratisasi yang sedang berlangsung dewasa ini perlu ditingkatkan dan dilembagakan. *Kedua*, sementara itu pada saat yang sama diperlukan pemerintahan yang efektif agar rakyat dapat menikmati secara konkrit hasil dari proses demokrasi dalam wujud kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Hal itu harus menjadi pilihan mengingat demokrasi dalam dirinya selalu mengandung kontradiksi antara *governability* (pemerintahan yang efektif) di satu pihak, *representativeness* (keterwakilan) di pihak lain. Secara lebih rinci prinsip-prinsip tersebut harus dituangkan dalam kebijakan politik perundangan komprehensif, kohesif serta koheren.

### **2. Reformasi partai politik**

Peningkatan kualitas pertama-tama adalah dengan melakukan pengkaderan partai politik. Pendidikan kader partai dimaksudkan untuk menghasilkan kader partai yang kapabel, akuntabel, mempunyai komitmen, kepekaan serta ketrampilan menterjemahkan ideologi kebijakan partai, disiplin terhadap keputusan partai sampai dengan ketrampilan-ketrampilan melakukan lobi, diskusi, meyakinkan lawan politiknya, berdebat, memimpin rapat, dan lain sebagainya. Dengan

melakukan kaderisasi dan pendidikan politik secara reguler maka kapasitas partai dalam menjalankan fungsi-fungsi pokoknya yakni sosialisasi dan pendidikan politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, partisipasi politik dan lain-lain juga akan ditingkatkan. Melalui proses pendidikan politik yang semacam itulah partai akan didorong melakukan institusionalisasi agar menjadi pilar demokrasi yang kredibel.

### **3. Kontrol dana parpol**

Agenda mendesak yang harus dilakukan jangka dekat adalah mengontrol dana partai politik. Kalau dibiarkan partai menjadi lembaga pemburu rente yang tidak hanya menggerogoti kredibilitasnya tetapi bahkan dapat melumpuhkan kehidupan demokrasi<sup>19</sup>. Oleh sebab itu pengaturan dana partai sangat penting dilakukan, karena tiadanya peraturan yang jelas dan tegas mengenai keuangan partai bukan hanya mengakibatkan *'vote buying'*<sup>20</sup>, tetapi yang lebih berbahaya adalah akses pemilik kapital terhadap penguasa atau calon penguasa-penguasa di dalam partai politik. Banyak dugaan dana partai selain dari para pemilik modal yang ingin selalu mempertahankan dan meningkatkan keuntungannya, disedot pula dari sumber-sumber kekayaan negara melalui akses parpol birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu lembaga perwakilan rakyat sebagai tempat bertemunya berbagai kepentingan politik selalu tidak tegas dalam menyusun rumusan tentang dana parpol.

Mengingat politik uang sudah menjadi bagian dari proses politik, ia harus dapat dicegah, diredam dan bahkan harus diberantas agar tidak

---

<sup>19</sup> Mietzner, Marcus, *Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption*, Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Volume 29, Number 2, August 2007, pp. 238-263.

<sup>20</sup> Pendalaman mengenai fenomena *'vote buying'*, antara lain dapat dibaca dalam: Schaffer, Frederic Charles (eds), *Election for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*, Ateneo De Manila University Press, 2000, dan Heinz Nassamacher, Karl, Foundation for Democracy: Approach to Comparative Political Finance, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001

mengakibatkan pembusukan politik yang semakin parah. Caranya, Papol mendapatkan subsidi dana negara, bukan Pemerintah, agar Lembaga negara dan pemeriksa keuangan negara seperti BPK, KPK dan PPAT mengontrol keuangan dana Papol. Diharapkan, persaingan dalam kompetisi politik tidak menjadi persaingan modal dana melainkan persingan menjual kadar Papol yang mem punyai kualitas integritas pribadi dan kompetensi manajerial tata Kelola kekuasaan negara. Bukan mengandalkan isi tas.

#### BIBLIOGRAFIE :

1. Albert Hirschman; Exit, Voice and Loyalty; 1970
2. Frank Furedi, "Where Have All the Intellectuals Gone?:"Confronting 21st Century Philistinism", 2006
3. Niza Yanay, The Ideology of Hatred, The Psychic Power of Discourse, 2013.
4. Jack Snyder: Terjemahan oleh Parakitri Simbolon ,Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah: Demokratisasi dan Konflik Etnis, KPG, 2003,
5. Niza Yanay, The Ideology of Hatred, The Psychic Power of Discourse, 2013.
6. Plato, (Terjemahan dalam bahasa Inggris oleh Chris Emyliyn-Jones, William Freddy: Republik; Harvard University Press, London, England, 2013.
7. Setya Wibowo, A; Khrematokrasi, Basis, nmr 05-06, 2014.
8. Grabow, Karsten dan Riek. E, Christian (eds.), Parties and Democracy, pp 110-111; Konrad-Adenauer-Stiftung e.V; Klingenhofenstrasse 23, D-10907 Berlin, Germany.

9. Hayek, FA; *The Constitution of Liberty*, Routledge & Kegan Paul Ltd, London EC4E 4EE.
10. Hirschman, Albert O., *The Passion and The Interest: Political Argument for Capitalist Before Its Trial*, Princeton University Press, New Jersey, 1997.
11. Hollifield, James F. & Jillison Calvin (eds), *Pathways to Democracy: The Political Economy of Democratic Transitions*, Routledge, London, 2000.
12. Huntington, Samuel P; *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press, 1991.
13. Jones, Michael E, *Libido Dominandi: Sexual Liberation and Political Control*; St Augustine's Press, South Bend, Indiana, 2000.
14. Kristiadi, J.; *Sistem Pemilihan Umum dan Representasi Politik dalam Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*; Bantarto Bandoro (eds), CSIS, Jakarta, 1995.
15. Kristiyanto, Eddy, OFM, *Sakramen Politik: Mempertanggungjawabkan Memoria*, Penerbit Lamalera, Desa Wilirejo, Kecamatan Pandak, Bantul, 2008;
16. Liphard, Arend (ed), *Parliamentary Versus Presidential Government*, Oxford University Press, 1992.
14. Mainwaring, Scott, *Presidentialism, Multipartyism, and Democracy: The Difficult Combination*, *Comparative Political Studies*, Volume 26, No. 2, July 1993, pp 198-228.
15. Mainwaring, Scott & Soberg Shugart (eds): *Presidentialism and Democracy in Latin America*, Cambridge University Press, 1997.
16. Przewosrski, Adam (et.al): *Democracy and Development: Political Institutional and Well-being in the World*, Cambridge University Press, 2000.
17. Przewosrski, Adam, *Democracy and the Market: Political and Economics Reforms in Eastern Europe and Latin America*, Cambridge University Press, 1991.

18. Montesquieu, *The Spirit of Laws*, diterjemahkan dan diedit oleh: Anne M. Cohler; Basia. Miller; Harold Stone; Cambridge University Press, New York, 1989.

19. Snyder, Jack, *Dari Pemungutan Suara Ke Pertumpahan Darah*, terjemahan dari buku *From Voting to Violence*, penterjemah: Martin Aleida & Parakitri T. Simbolon, Penerbit Gramedia, November 2003.

20. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank Report: *Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth*, First Printing November 1989, manufactured in the United States of America.

21. Yuval Noah Harari, *Homo Deus, A Brief History of Tomorrow*, Penguin Random House, UK, 2015.

22. Yuval Noah Harari, *21 Lessons For The 21<sup>st</sup> Century*; Penguin Random House, UK, 2018.

## **AGENDA MENDESAK**

### **4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif.**

Beberapa prinsip mendasar dan paradigma yang harus dijadikan acuan dalam menyusun penyempurnaan regulasi politik adalah sebagai berikut. *Pertama*, proses demokratisasi yang sedang berlangsung dewasa ini perlu ditingkatkan dan dilembagakan. *Kedua*, sementara itu pada saat yang sama diperlukan pemerintahan yang efektif agar rakyat dapat menikmati secara konkrit hasil dari proses demokrasi dalam wujud kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Hal itu harus menjadi pilihan mengingat demokrasi dalam dirinya selalu mengandung kontradiksi antara *governability* (pemerintahan yang efektif) di satu pihak, *representativeness* (keterwakilan) di pihak lain. Secara lebih rinci prinsip-

prinsip tersebut harus dituangkan dalam kebijakan politik perundangan komprehensif, kohesif serta koheren.

## **5. Reformasi partai politik**

Peningkatan kualitas pertama-tama adalah dengan melakukan pengkaderan partai politik. Pendidikan kader partai dimaksudkan untuk menghasilkan kader partai yang kapabel, akuntabel, mempunyai komitmen, kepekaan serta ketrampilan menterjemahkan ideologi kebijakan partai, disiplin terhadap keputusan partai sampai dengan ketrampilan-ketrampilan melakukan lobi, diskusi, meyakinkan lawan politiknya, berdebat, memimpin rapat, dan lain sebagainya. Dengan melakukan kaderisasi dan pendidikan politik secara reguler maka kapasitas partai dalam menjalankan fungsi-fungsi pokoknya yakni sosialisasi dan pendidikan politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, partisipasi politik dan lain-lain juga akan ditingkatkan. Melalui proses pendidikan politik yang semacam itulah partai akan didorong melakukan institusionalisasi agar menjadi pilar demokrasi yang kredibel.

## **6. Kontrol dana parpol**

Agenda mendesak yang harus dilakukan jangka dekat adalah mengontrol dana partai politik. Kalau dibiarkan partai menjadi lembaga pemburu rente yang tidak hanya menggerogoti kredibilitasnya tetapi bahkan dapat melumpuhkan kehidupan demokrasi<sup>21</sup>. Oleh sebab itu pengaturan dana partai sangat penting dilakukan, karena tiadanya peraturan yang jelas dan tegas mengenai keuangan partai bukan hanya mengakibatkan 'vote buying'<sup>22</sup>, tetapi yang lebih berbahaya adalah

---

<sup>21</sup> Mietzner, Marcus, *Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption*, *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Volume 29, Number 2, August 2007, pp. 238-263.

<sup>22</sup> Pendalaman mengenai fenomena 'vote buying', antara lain dapat dibaca dalam: Schaffer, Frederic Charles (eds), *Election for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*, Ateneo De Manila University Press, 2000, dan Heinz Nassamacher, Karl, *Foundation for Democracy: Approach to Comparative Political Finance*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001

akses pemilik kapital terhadap penguasa atau calon penguasa-penguasa di dalam partai politik. Banyak dugaan dana partai selain dari para pemilik modal yang ingin selalu mempertahankan dan meningkatkan keuntungannya, disedot pula dari sumber-sumber kekayaan negara melalui akses parpol birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu lembaga perwakilan rakyat sebagai tempat bertemunya berbagai kepentingan politik selalu tidak tegas dalam menyusun rumusan tentang dana parpol.

Mengingat politik uang sudah menjadi bagian dari proses politik, ia harus dapat dicegah, diredam dan bahkan harus diberantas agar tidak mengakibatkan pembusukan politik yang semakin parah. Caranya adalah membatasi dan mengontrol keuangan partai dan dana kandidat.